**BAB I**

# PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang

Di era kontemporer ini, setiap negara perlu bekerja sama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mewujudkan kepentingan nasional mereka. Menurut K.J. Holsti, dalam bukunya Politik Internasional: *A Framework for Anaylis*, tujuan negara-negara yang bekerja sama secara internasional adalah untuk mencapai kepentingan nasional yang tidak dapat dicapai di dalam negeri. Dipahami bahwa masalah ini perlu dikelola dengan baik karena dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, negara-negara berusaha menyelesaikan masalah dengan bekerja sama dengan negara lain. Kerja sama internasional meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, budaya, dan ekonomi yang berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara (Ikbar, 2014).

Kerjasama antara negara dan non-negara dalam hal ini lembaga atau organisasi internasional mulai berkembang karena baik negara maupun organisasi saling memebutuhkan untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang sama, dan adanya lembaga atau organisasi tersebut mengurangi biayadan mewadahi informasi pada kerjasama (Keohane dan Nye, 2001). Kerja sama internasional dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, dimulai dari kerangka kerja sama multilateral dan bilateral dalam organisasi dan lembaga internasional. Salah satu kerjasama bilateral menggambarkan hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara yang berkepentingan dalam beberapa aspek, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Kerjasama bilateral adalah bantuan internasional atau bantuan luar negeri, transfer sumber daya dari satu negara ke negara lain.

Bantuan luar negeri adalah sarana untuk mencapai pembangunan atau pertumbuhan dengan bantuan pihak lain seperti bangsa dan organisasi. Bantuan ini dapat berupa bantuan ekonomi, militer atau kemanusiaan seperti bencana alam. Bantuan luar negeri mencagkup transfer sumber daya keuangan atau barang seperti makanan, peralatan militer, nasihat teknis, dan pelatihan (Morgenthau, 1962). Menurut Ismail Yusanto (2004), bentuk bantuan luar negeri yang paling umum adalah *Official Development Assistance,* yang diberikan untuk memajukan pembangunan dan mengentaskan kemiskinan di suatu negara. Bantuan yang diberikan juga dapat berbentuk pinjaman, dan negara-negara donor biasanya menentukan jangka waktu pembayaran dan bunga yang dibayarkan. Salah satu aktor dalam hubungan internasional yang berperan dalam hal ini yaitu *United States Agency for International Development* (USAID).

*United States Agency for International Development* (USAID) bertugas memberikan bantuan luar negeri berupa bantuan kemanusiaan, kesehatan, dan ekonomi kepada negara-negara berkembang, yang diprakarsai oleh John F. Kennedy dalam Undang-Undang Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat tahun 191. USAID menjadi lembaga bantuan luar negeri Amerika Serikat pertama yang fokus pada upaya pembangunan ekonomi. Pada tahun 2000-an, USAID berfokus pada layanan penting seperti pembangunan pemerintah, infrasturktur, masyarakat sipil, dan pendidikan kesehatan.

Di Indonesia, USAID mulai membantu sejak Amerika Serikat dan Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi pada tahun 1950. Amerika Serikat memiliki $80 juta dalam bantuan keuangan sektor umum melalui USAID dan telah menyediakan $67 juta untuk memperbaiki dampak perang di Indonesia. Pada akhir 1960-an, misi USAID di Indonesia adalah membantu pemerintah mengatasi masalah pertumbuhan penduduk Indonesia.

USAID juga menawarkan berbagai program yang selaras dengan misi dan tujuan badan tersebut untuk meningkatkan ekonomi dan transisi menuju demokrasi. Program jangka pendek yang dijalankan USAID diharapkan dapat mengurangi dampak krisis ekonomi terhadap masyarakat lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, USAID telah terlibat dalam upaya mengatasi krisis ekonomi dan politik di Indonesia. Program yang dilaksanakan meliputi transisi demokrasi, perbaikan sistem ekonomi dan keuangan, peningkatan kesempatan kerja, pemeliharaan lingkungan, dan ketahanan pangan untuk kelompok penduduk tertentu (Downing, 2011).

Salah satu masalah ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia adalah tingginya tingkat angka pengangguran dan lapangan kerja di kalangan lulusan sarjana. Diperlukan tindakan segera untuk menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia, khususnya di sektor UMKM (Eleanora, et al., 2018). Peran akademisi sangat penting dalam menampung mahasiswa dan memberikan mereka tempat untuk berwirausaha. Karena permasalahannya tidak cukup hanya mengharapkan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Data BPS tahun 2018 menunjukkan hampir 8% dari total 7 juta lebih sarjana menganggur. Jumlah tersebut meningkat sebesar 1,3% dari tahun 2017. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tingkat pengangguran di kalangan mahasiswa mencapai 8,8% pada tahun 2017. Jumlahnya melebihi 630.000. Kesempatan kerja yang terbatas harus dimanfaatkan oleh lulusan perguruan tinggi sebagai insentif untuk berani memilih berwirausaha sebagai karier.

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan, perguruan tinggi bertanggung jawab untuk membekali lulusan dengan pendidikan, forum, dan keterampilan kewirausahaan yang memotivasi mereka untuk memulai berwirausaha. Perguruan tinggi harus memberikan pendidikan kewirausahaan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat mereka untuk berwirausaha (Yohnson, 2003). Pendidikan kewirausahaan diharapkan dapat memberikan landasan teoritis bagi konsep kewirausahaan dan membentuk pola pikir, sikap dan perilaku wirausahawan (Nursito, et al., 2013).

Pendidikan Kewirausahaan adalah ilmu yang mengkaji nilai, keterampilan, dan perilaku dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Mengajarkan pendidikan kewirausahaan sebagai suatu disiplin ilmu memiliki dua konsep, yaitu penciptaan usaha da pertumbuhan usaha, dan tujuan lain, kemampuan berkreasi, karena terdapat kumpulan pengetahuan yang lengkap dan benar (Suryana, 2006). Pendidikan kewirausahaan juga dapat secara langsung mengubah pola pikir, sikap dan perilaku seseorang untuk menjadi seorang wirausaha, sehingga berwirausaha dipilih sebagai pilihan karir (Lestari, 2012). Dukungan akademik yang antusias untuk mendorong kewirausahaan yang efektif di kalangan mahasiswa bertujuan untuk mengambangkan lulusan yang memiliki keberanian untuk memilih karier di bidang kewirausahaan dan yang dapat berkontribusi dalam memecahkan masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

Pendidikan kewirausahaan yang diberikan oleh perguruan tinggi pada mahasiswa hanyalah berbentuk materi saja, sehingga mahasiswa hanya menguasai materi namun tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan materi tersebut ke dunia berwirausaha yang nyata. Untuk itu, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, USAID mendukung hubungan kerja sama dengan Indonesia, salah satunya dibidang pendidikan untuk pengembangan potensi perekonomian negara dan membantu masyarakat keluar dari angka pengangguran melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Kewirausahaan yang diikuti oleh 10 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dalam program ini, USAID memberikan hibah senilai US$15 juta atau Rp203 juta dalam bentuk evaluasi pengembangan kurikulum pelatihan, modul pendampingan, mekanisme pengawasan, dan pelaksanaan program pengabdian masyarakat kewirausahaan. KKN bertema wirausaha ini merupakan kegiatan non profit dengan mahasiswa sebagai peserta dan dosen sebagai pembimbing dengan tema kewirausahaan.

Dari beberapa uraian di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut peran dan pengaruh dari bantuan USAID dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan kewirausahaan mahasiswa Indonesia sebagai studi kasus dalam Ilmu Hubungan Internasional. Maka dari itu judul dari skripsi ini adalah “*Kerja sama USAID (United States Agency For International Development*) *Dengan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Dalam Meningkatkan Pendidikan Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia.*”

* 1. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang di atas, penulis meyarankan untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerja sama USAID dengan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan di bidang pendidikan kewirausahaan?
2. Bagaimana kondisi pendidikan kewirausahaan khususnya mahasiswa di Indonesia?
3. Bagaimana kerja sama USAID dengan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan dalam meningkatkan pendidikan kewirausahaan mahasiswa di Indonesia?
	* 1. Pembatasan Masalah

Menunjuk pada identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, penulis akan melakukan pembatasan masalah agar memiliki kompabilitas yang pasti mengenai sumber dan referensi yang dikaji dalam penelitian sehingga memudahkan penulis melakukan fokus penelitian. Penulis akan memfokuskan penelitian ini pada pelaksanaan program KKN Tematik Kewirausahaan dalam meningkatkan pendidikan kewirausahaan mahasiswa Indonesia di Universitas Kuningan, Jawa Barat pada tahun 2020-2021.

* + 1. Perumusan Masalah

Rumusan masalah diusulkan untuk memfasilitasi analisis masalah berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah. Penulis merumuskan masalah yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

“Bagaimana pelaksanaan kerjasama antara United States Agency for International Development (USAID) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bertema Kewirausahaan dapat meningkatkan pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa Indonesia?”

* 1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
		1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kerja sama USAID dan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan dalam pendidikan kewirausahaan mahasiswa.
2. Untuk mengetahui bentuk kerja sama USAID dan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan dalam meningkatkan pendidikan kewirausahaan mahasiswa di Indonesia.
3. Untuk mengetahui implementasi program USAID dalam meningkatkan pendidikan kewirausahaan mahasiswa di Indonesia.
	* 1. Manfaat Penelitian
4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta membantu melatih cara berpikir, memahami dan mengamati realitas hubungan internasional khususnya berkenaan dengan kajian masalah yang diteliti.
5. Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian-penelitian lain yang terkait dengan topik yang dibahas dan sebagai tambahan literatur untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hubungan internasional untuk penelitian selanjutnya.
6. Penelitian ini untuk bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian sarjana (S-1) Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Pasundang, Bandung.